
KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DENGAN INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT (IFAD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Erni Mayura¹

Abstract: Poverty is caused by several things, such as limited natural resources, inadequate infrastructure, and low empowerment of coastal communities in a country. Therefore, the Coastal community in Southeast Maluku is part of the Coastal community, which is poor. One of the problems of poverty in Indonesian Coastal Communities, especially in eastern Indonesia. This allows IFAD to assist Indonesia through the CCDP Project. The type of research used is descriptive with qualitative methods. In collecting data, this study used secondary and primary collection techniques. The results of this study indicate that the cooperation between the Southeast Maluku government and IFAD in Coastal Community Empowerment through the Coastal Community Development Project (CCDP) with several stages, namely group formation, mentoring, planning, and activities that produce independence and the ability of coastal communities in improving the economy of the community in Southeast Maluku. ..

Keywords: CCDP, IFAD, Southeast Maluku

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan, dan hal ini sesuai dengan konsep negara kepulauan sebagaimana tertuang dalam prinsip negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, Indonesia telah menyediakan ketentuan Pasal 50 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dalam ketentuan nasionalnya dalam Pasal 7 ayat 1 Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Sigit Sutadi Nugroho, 2019).

Indonesia memiliki potensi perikanan yang melimpah, dua pertiga daratannya merupakan lautan seluas 5,8 juta kilometer persegi, hingga data terakhir menurut Food and Agriculture Organization tahun 2020, Indonesia menempati urutan kedua penghasil perikanan terbesar dunia setelah China seharusnya memiliki potensi perikanan yang besar, dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan di Indonesia, namun berbanding terbalik dengan keadaan masyarakatnya.(fao.org, 2020)

Maluku Tenggara yang merupakan bagian dari Maluku Tenggara di Indonesia bagian timur, masih menjadi masalah yang dihadapi masyarakat pesisir Maluku Tenggara, dengan angka pertama 27,70% di Japen, kedua di Kota Japen. Tenggara Mar 25,23%, Kupang 3 23,37%, Emas 4 18,93%, Westronbok 5 17,38%, Kabupaten 6, Merauke 11,10%, Bitun 7 6,87%, 8 Palais-Pallet 6,8%, 9 Kubraya kedua 5,22%, kesepuluh Makassar sebesar 4,38%, kota Ambon ke-11 sebesar 4,38%, dan kota kedua belas adalah Ternate sebesar 2,9%.(bps.go.id, 2015).

Di Maluku Tenggara sebagian besar masyarakatnya tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga mata pencaharian utama masyarakatnya adalah nelayan

¹ Mahasiswa Program SI Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : ernimayura271018@gmail.com

yang tergolong nelayan tradisional yang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi dengan pendapatan yang rendah. Kebutuhan hidup, tingkat melek huruf tinggi. Masih banyak, pendidikan dan kesehatan yang buruk mempengaruhi masyarakat pesisir. Situasi ini muncul karena keterbatasan kemampuan finansial dan pengetahuan masyarakat, serta akses informasi dan permodalan yang masih sulit. Pasar karena keterisolasian masyarakat pulau-pulau kecil, teknologi, bahkan perahu hanya menggunakan perahu kecil hingga 25 perahu tidak memiliki perahu besar, sedang dan dominan tanpa motor, ini jumlah yang sangat besar. Lebih banyak RTP (rumah tangga nelayan), yaitu alat tangkap 2554 nelayan, masih menggunakan alat tradisional, sehingga hasil yang diperoleh tidak sebanding. (maluku.bps.go.id, 2013)

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi nelayan mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 45 tentang Perikanan/Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan masyarakat. penghidupan diberikan untuk memperluas kesempatan kerja, sekaligus melindungi sumber daya ikan dan lingkungan. Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Catatan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perlindungan Nelayan didorong oleh Program Peningkatan Mata Pencarian Nelayan (PKN). Memberikan pekerjaan tambahan yang murah bagi keluarga nelayan, program UMK (upah minimum regional. (maluku.bps.go.id, 2013).

Belajar dari permasalahan tersebut, pada tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). IMF sendiri adalah lembaga keuangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 1977, IMF telah memberikan bantuan kepada Indonesia sejak tahun 1980-an, dan KKP, bekerja sama dengan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian, sepakat untuk mengembangkan model pemberdayaan yang lebih komprehensif. atau community development melalui Coastal Community Development Project (PMP) atau proyek Coastal Community Development (CCDP), ini hadir sebagai respon terhadap kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kerjasama CCDP yang direncanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dan Dana berfokus pada Indonesia bagian timur, Hal ini juga sejalan dengan Strategic Opportunity Programme for Countries (COSOP) IFAD untuk memfokuskan proyek di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Proyek ini mencakup 181 desa Pesisir, 56 kecamatan, 12 kabupaten/kota: Japeng, Melauke, Ternate, Ambon, Marc Tenggara, Kupang, Rombok Barat, Makassar, Parepare, Gorontalo Utara, Bitun, Kubraya, Belajar Badun sebagai pusat (anafisipunpad13.blogspot.co.id, 2014).

Maluku Tenggara adalah satu-satunya kabupaten dengan peringkat kelompok yang sepenuhnya berhasil, yang berarti persentase yang diperoleh adalah (100%), yang sangat tinggi. Disusul Rombok Barat (99%), Ambon (99%), Bitung (95%) dan Yapen. (92%), Kubraya (91%), Ternate (86%), Makassar (85%), Gorontalo Utara (77%)

Parepare (74%) Merauke (69%), Kupan (50%). Selain itu, penilaian ringkasan grup berarti bahwa Maluku Tenggara adalah satu-satunya kabupaten dalam penilaian (kurang dari 0, 0 kegagalan) dan semua grup bisnis melakukan yang terbaik seperti yang diharapkan. Keberhasilan Maluku Tenggara dalam program CCDP tentu tidak terjadi begitu saja. Hal ini menarik untuk dikaji, karena tidak terlepas dari kerjasama antara IFAD dengan Maluku Tenggara Government (ccdp-ifad.org, 2018).

Kerangka Teori

Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan antar negara, dan pada dasarnya semua negara di dunia ini saling ketergantungan, tidak dapat berdiri sendiri baik dalam memenuhi kebutuhan rakyat maupun negaranya tanpa negara lain, Menurut K.J Holsti, Kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih Kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, di promosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai – nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah – masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang di lakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. (K.J Hostli, 1998) .

Kerjasama Internasional meliputi kerjasama dibidang sosial, kebudayaan dan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sesuai dengan politik luar negeri masing – masing ”, terdapat bentuk kerjasama berdasarkan sifatnya yaitu :

1. Kerjasama Universal (Global) adalah kerjasama bersifat universal yang dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa dalam satu wadah yang menciptakan dan memepersatukan mereka dalam cita- cita bersama dan menghindari disentrigrasi internasional.
2. Kerjasama Regional, adalah kerjasama yang dilakukan di oleh negara – negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, yang tentunya memiliki tujuan untuk kepentingan masing” Negara.
3. Kerjasama Teknis, adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dengan capaian atau hasil dimana output berbentuk barang atau jasa.
4. Kerjasama Fungsional, adalah kerjasama pada negara negara yang terlibat dan memiliki fungsi tertentu sehingga kerjasama melengkapi berbagai kekurangan dalam masing – masing negara (Boediono, 1981).

Kerjasama internasional yang diselenggarakan oleh negara-negara di dunia menurut jumlah anggotanya

1. ***Kerjasama Bilateral*** adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai kepentingan negaranya, Kerjasama bilateral dapat terjalin apabila kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan saling menempatkan wakilnya di tiap-tiap

negara, Dalam proses pelaksanaan, hubungan bilateral bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi

2. Kerjasama Regional adalah kerjasama yang dilakukan antar negara yang dilakukan di kawasan tertentu.

3. Kerjasama Antar Regional adalah kerjasama yang dilakukan dua kelompok antar kerjasama Regional

4. Kerjasama Multilateral, adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara atau lebih dari dua dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan tertentu. Berdasarkan keempat bentuk kerjasama yang dikemukakan diatas, (Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2009).

Di dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan Indonesia sebagai negara anggota PBB, penerima bantuan hibah melalui organisasi IFAD (*International Fund For Agriculture*) bekerjasama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat bertujuan menangani kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara Konseptual Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata power atau kekuasaan, Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, mendirikan, memperkuat posisi tawar menawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Menurut Sumaryadi pemberdayaan adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya sebagai berikut: pertama Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan. Kedua Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Meskipun pemberdayaan masyarakat tidak lahir dalam konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak sekedar

meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti gizi anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Edi Suharto, 2005).

Menurut Sumaryadi menggambarkan konsep pemberdayaan dalam tiga tahapannya itu tahapan politis, organisasi, dan individu. Adapun tiga tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Politis dan Nasionalis Pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa kita setiap hari sebagai *mechanism of self-help for people* (mekanisme bantuan dari dan bagi orang lain). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa justru orang yang ingin mengubah sesuatu mengenai keadaan mereka saat ini adalah diri mereka sendiri. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan-lahan diganti oleh ketergantungan pada diri sendiri. Oleh karena itu, pada tingkat nasional *self-dependency movement* (gerakan pada kemampuan diri sendiri) terus mendapat tempat. Alasan lain dan lebih pragmatis adalah bahwa ilmu ekonomi dari dorongan terhadap efisiensi yang lebih besar mendorong pemerintah. Organisasi dari masyarakat untuk mencari cara-cara alternatif untuk menjadi lebih efisien, yang merupakan tanggapan terhadap meningkatkan daya dan ancaman pelayanan alternatif dari para pesaing.

Organisasi Pemberdayaan mempunyai daya tarik. Selalu ada pencarian akan gagasan-gagasan dan konsep baru dari pemberdayaan lebih baru, lebih segar dari pada banyak teori peningkatan dan motivasi kerja yang sudah usang. "Organisasi seperti *total quality, habitual improvement, self-directed team work, internal customer, competence management* dan sebagainya. Banyak perilaku faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan terkandung dalam nilai-nilai, perilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi perubahan-perubahan harus dilakukan pada tingkat yang berada diluar pengaruh individu. Mereka tidak mungkin terjadi tanpa perencanaan dan pelepasan yang menyeluruh dari kekuatan oleh manager senior organisasi.

Individu Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap individu. Ada yang lama, ada juga yang disingkat prosesnya. Bila pemberdayaan efektif, hasilnya sangat inspirasional, individu sudah mengubah kehidupan mereka mencapai tujuan dan target yang terjangkau yang mereka anggap tidak mungkin. Mereka sudah membuka jalan bagi perkembangan dan pertumbuhan yang menguntungkan mereka maupun organisasi bila tim individu yang di berdayakan secara kolektif berkerja sama maka sinergi tercapai

Ada 4 prinsip yang digunakan dalam mensukseskan program pemberdayaan yaitu : Prinsip Kesetaraan, prinsip utama dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu kesetaraan, atau sejajar, kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat. Prinsip Partisipasi, semua kegiatan program melibatkan masyarakat, mulai direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri, dengan melibatkan pendamping yang berkompeten. Keswadayaan atau kemandirian, mengedepankan kemampuan dari masyarakat, masyarakat sebagai subjek, bukan objek, sehingga kemampuan mereka dapat berkembang Berkelanjutan, Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan sampai masyarakat dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dan keseimbangan yang tercipta baik dari kelompok masyarakat dan pemerintah.

Tujuan Pemberdayaan itu sendiri untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disvantage*) dimana pada kenyataanya

bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat kelompok masyarakat saling berkompetisi satu dengan lainnya, sehingga munculah sebuah kelompok masyarakat yang berkuasa memiliki kekuasaan absolut, dan ketidakberuntungan pun dihadapi salah satu kelompok karena posisi lemah sehingga diperlukan pemberdayaan pada kelompok masyarakat tersebut.

Jenis Pemberdayaan masyarakat dapat berupa penyadaran, pelatihan, atau pemberian dana, beberapa jenis bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Bidang Ekonomi, merupakan salah satu misi yang paling utama yaitu mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi, seperti pinjaman Kredit usaha Rakyat, pelatihan keterampilan Masyarakat, badan usaha milik desa.
- 2) Bidang Pemberdayaan kesehatan, sangat di butuhkan dalam kehidupan bermasyarakat terkhusus di pedesaan, dimana masih sedikitnya akses pada sarana kesehatan, kurangnya memperhatikan masalah kesehatan, upaya yang dilakukan meningkatkan sarana dan prasarana dalam kesehatan, promosi dan penyeluhuan program kesehatan.
- 3) Bidang Pemberdayaan sosial dan budaya, merupakan pemberdayaan terhadap budaya, yang memiliki nilai – nilai sejarah sebagai identitas dan ketika di kembangkan maka menjadi penilain lebih bagi masyarakat itu sendiri. Seperti sanggar tari,
- 4) Pemberdayaan lingkungan, menciptakan lingkungan sekitar dengan berbagai kegiatan yang tidak hanya berdampak pada masyarakat namun dari alam sekitar, seperti timbal balik antar manusia dan lingkungan,

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan IFAD dengan KKP terhadap Masyarakat Pesisir merupakan Pemberdayaan yang menggunakan tahap Organisasi dan dilihat dari bentuknya yaitu bentuk Pemberdayaan Ekonomi dengan fokus pada masalah kemiskinan di masyarakat pesisir, dengan menggunakan pendapat ahli Sumaryadi I Nyoman menggunakan pendekatan strategi The development approach, pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan 25 keswadayaan masyarakat dengan empat prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu kesetaraan antara pembuat kebijakan program dengan masyarakat sebagai subjek, program melibatkan masyarakat dalam pembuat kebijakan pembentukan kelompok usaha dan di awasi oleh petugas dari lembaga, bersama masyarakat dengan output atau hasil masyarakat itu sendiri yang merasakan, yang programnya berkelanjutan dan menjadi acuan sebagai contoh baik untuk masyarakat pesisir Maluku Tenggara dan wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Dimana penulis menggambarkan bagaimana Kerjasama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan *International Fund For Agriculture Development (IFAD)* dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet dan wawancara melalui aplikasi messenger. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif, kemudian menggunakan teori untuk mengidentifikasi sebuah proses dari kejadian yang penulis teliti.

Hasil dan Pembahasan

Kerjasama Pemerintah Maluku Tenggara dengan IFAD

1. *Frame Work COSOP*

Sebelum pelaksanaan kerjasama antara pemerintah Maluku Tenggara dengan IFAD, Indonesia sebelumnya telah mengirimkan proposal atau permintaan bantuan keuangan kepada National Strategic Opportunity Plan (COSOP), yang merupakan kerangka atau bantuan keuangan yang dimiliki IFAD saat merumuskan model operasi khusus Untuk mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan, setelah COSOP menerima laporan Indonesia, COSOP akan merumuskan kerangka kerja untuk menentukan pembiayaan IFAD, membangun kemitraan dan mempromosikan manajemen. Ada dokumen khusus untuk meninjau situasi kemiskinan di pedesaan Indonesia Biasanya dokumen tersebut menjadi dasar bagi IFAD untuk menentukan letak geografis dan menentukan wilayah yang relevan, sehingga IFAD dapat merumuskan jalur strategis bagi negara tujuan melalui manajemen yang produktif. ([Tugas Hukum Organisasi Internasional IFAD, 2021](#)).

Pembentukan COSOP bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dan rencana yang dilakukan oleh IFAD berdampak positif bagi suatu negara. Dengan menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional (Indonesia sebagai negara tujuan), memastikan bahwa wilayah tersebut keluar dari kemiskinan, tetap relevan dan sejalan dengan kerangka kerja Indonesia. Fase COSOP dimulai:

1. Rencana proyek yang bertujuan melihat realitas lapangan dengan memadukan kerangka IFAD dengan kebutuhan dan aspirasi desa miskin untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Konsep Proyek, Konsep Proyek IFAD terutama didasarkan pada perumusan COSOP, tetapi untuk negara-negara yang tidak bekerja sama dengan COSOP, konsep proyek diperoleh dari kesepakatan yang diperoleh melalui konsultasi dengan pemerintah dan faktor lainnya.
3. Project Development Report (PDR) merupakan dokumen utama pelaksanaan proses pembangunan proyek, yang harus dikonsultasikan dengan pemerintah. PDR harus dikenakan biaya :
 - a. Konteks strategis dan rasio keterlibatan, komitmen dan kemitraan IFAD,
 - b. Kemiskinan, modal sosial target yang ingin dicapai
 - c. Implementasi dan Pengaturan Kelembagaan
 - d. Implementasi dan pengaturan kelembagaan
 - e. Manfaat Proyek, biaya dan pembiayaan
 - f. Resiko dan keberlanjutan Proyek
 - g. Inovasi yang disertai pembelajaran dan manajemen ilmu pengetahuan.
4. *Design Completion and Quality Assurance*

Penyelesaian desain dan penjaminan mutu dilakukan setelah PDR dibuat dengan memperoleh penjaminan mutu dan kemandirian. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah memuaskan atau tidak.

5. Negosiasi dan persetujuan IFAD, di mana IFAD bernegosiasi dengan peminjam dana berdasarkan perjanjian pinjaman. Berdasarkan kontrak, komite eksekutif menguraikan kesepakatan. Jika persyaratan dan kelayakan dipenuhi, IFAD dan Indonesia telah menandatangani perjanjian pinjaman setelah Komite Eksekutif menyetujui pinjaman atau hibah..
6. Implementasi Implementasi dimulai setelah Indonesia memenuhi persyaratan tertentu, sehingga IFAD mengumumkan pinjaman atau hibah, dan proyek-proyek yang didanai oleh IFAD dijalankan oleh staf nasional Indonesia Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Bekerja sama dengan IFAD , bersiap untuk menyelesaikan laporan, dengan fokus pada dampak rencana terhadap kemiskinan pedesaan hingga akhir implementasi

Kantor Evaluasi, yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi operasi dan kebijakan IMF, bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Eksekutif IMF. Dengan tahapan tersebut, proses kerjasama Indonesia dengan IFAD akan mulai membantu daerah pedesaan di negara berkembang maju dan sejahtera ([Tugas Hukum Organisasi Internasional IFAD, 2021](#)).

2. Coastal Community Development Project (CCDP- IFAD)

Kerangka COSOP juga mengumumkan hasil kebijakan berupa proyek IFAD CCDP, dan pada tanggal 23 Oktober 2012, Dewan IFAD menyetujui dan menandatangani proyek CCDP yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada empat alasan mengapa proyek tersebut diusulkan oleh KKP dan mengapa IFAD perlu mempertimbangkan dan pada akhirnya mendanai proyek tersebut

1. Masyarakat Pesisir dan Pulau – Pulau kecil termasuk wilayah yang memiliki kantong kantong kemiskinan
2. Banyak Komunitas telah menunjukkan motivasi dan komitmen untuk meningkatkan Perekonomian dan pembangunan
3. Mmemiliki Peluang dalam Sumber daya laut yang bernilai tinggi, dengan potensi pasar
4. Proyek sepenuhnya mendukung kebijakan Pemerintah Indoensia dalam mereplikasikan tentang sumber daya dan perubahan iklim .

CDDP IFAD ini mencakup kerjasama pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal/kota untuk pendanaan proyek, pembiayaan, dan hibah IFAD CCDP untuk Indonesia (total US\$43,2 juta). Rinciannya termasuk hibah IFAD sebesar \$2 juta. USD dari Dana Perwalian Spanyol sebesar US\$7,8 juta, dan kontribusi Pemerintah Indonesia melalui APBN sebesar US\$7,1 juta, dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) sebesar US\$2,1 juta, 12 standar proyek berbasis COSOP, atau Kab. Merauke,

Kabupaten Japen, Kota Ternate, Lobak. Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Kupang, Kabupaten Lombok Barat, Kota Makassar, Kota Palais-Pare, Lobak. 57 Gorontalo Utara, Kota Bitung, Lobak. Kubraya sebagai pusat pembelajaran.

Proyek ini akan dilaksanakan selama lima tahun dari 2013 hingga 2017 dengan tujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang miskin dan aktif secara ekonomi di Indonesia bagian timur. pendeknya. Pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pengelolaan sumber daya pesisir, yang merupakan inti dari proyek untuk mendanai lebih dari dua pertiga dari investasi proyek, semua kegiatan adalah masyarakat, perekrutan dan pelatihan fasilitator proyek pengembangan masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat. Pembentukan proyek Village Working Group (VWG), pelatihan, konsultan untuk memperdalam pemahaman tentang pengembangan kapasitas, melakukan inventarisasi dan evaluasi desa CCDP, perencanaan / pengeditan rencana pengembangan kelautan desa partisipatif, inventarisasi sumber daya pesisir, kampanye Kesadaran Masyarakat, Pembangunan/Perlengkapan Pusat Informasi Desa, Pembentukan, Pelatihan dan Pembekalan Kelompok Manajemen Bersama of Rencana Pengelolaan Bersama Laut Pesisir, Investasi Skala Kecil untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Dukungan Tingkat Kabupaten untuk Operasi Pengelolaan Bersama Desa Dana Usaha Masyarakat dan Infrastruktur, untuk pembiayaan produksi/pemasaran, kelompok usaha, usaha jasa berbasis desa dan skala kecil yang dikelola masyarakat community infrastruktur ekonomi yaitu :

1. Program Kelompok Tabungan
2. Pelatihan dan Dukungan Teknis untuk Kelompok Usaha dan Infrastruktur Masyarakat
3. Pengembangan Ekonomi berbasis Kelautan dan Perikanan, membangun kapasitas Kabupaten / Kota sasaran untuk mendukung Kabupaten untuk meningkatkan pembangunan Ekonomi berbasis kelautan, dengan dua sub-komponen, yaitu Investasi pada level kabupaten dan Pengembangan Kapasitas; serta Pemasaran dan Dukungan Rantai Nilai
4. Pengelolaan Proyek, dimana dilakukan koordinasi pelaksanaan menyeluruh di tingkat Pusat melalui kantor Pengelola proyek (PMO) yang berbasis di KKP, layanan Konsultan terkait pelatihan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan proyek berjalan setelah komponen 1 berlangsung dan investasi 60 % di alokasikan bagi Komponen 1, dan komponen 2 baru di laksanakan pada triwulan kedua untuk mendukung value chan produk komponen
5. Kemudian IFAD dan Indonesia melakukan Joint Review Mission dan dilaksanakan pada tanggal 28 April hingga 12 Mei di Tahun 2014 untuk mengkaji sejauh mana perkembangan Implementasi dan tujuan serta kinerja Proyek PMP atau disebut CCDP, dan hasil review secara keseluruhan dinilai sebagai Satisfactory dan pencapai tujuan proyek dinilai Moderately Satisfactory menurut metodologi penilaian IFAD, untuk memperkuat Implementasi, tim membuat sebuah daftar rekomendasi Aksi, dan 90 persen

aksi tersebut telah dipenuhi 31 Desember, Hal ini terkait pembentukan PMO sebagai Organisasi Pengelola.

CCDP dikoordinasikan secara nasional, tetapi dilaksanakan di wilayah dan desa, oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia harus meloloskan dan membentuk suatu badan administratif yaitu Project Management Office (PMO), Hal ini didasarkan pada pertimbangan terkait penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat pesisir, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendapat dukungan dari IFAD atau CCDP. Beberapa tugas PMO adalah: (direktur umum KP3K NO. Untuk menjaga. 16/KP3K/2012 tanggal 14 Maret 2012, Pada tanggal 28 Februari 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki SK 67 pegawai)

Pertama Sebagai Pengarah, dengan mengarahkan dan membimbing pelaksana dalam Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Proyek CCDP, Kedua Sebagai Pelaksana hal ini terkait Direktur, Sekretaris Eksekutif, Asdir Pemberdayaan Masyarakat, Asdir Pembangunan Ekonomi, berbasis kelautan, Infrastruktur, Pemasaran, Monitoring dan Evaluasi, Ketiga PMO juga dibantu oleh Pakar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kelautan dan Pesisir, keempat Untuk Kelancaran Pelaksanaan tugas Organisasi Pengelola Proyek CCDP Didukung oleh Kelompok kerja Pemberdayaan dan kelompok kerja Pemasaran, kelima PMO bertanggungjawab dan menyampaikan lamporan secara berkala kepada Kementrian Kelautan dan perikanan, keenam Masa kerja PMO dimulai saat dibentuk dan dikeluarkan diktum tgl 28 Februari sampai dengan Desember 2014. PMO juga menggunakan Pemanfaatan sistem komunikasi digital melalui Website CCDP, Serta Aplikasi WhatsApp dalam memfasilitasi komunikasi diantara semua level Proyek, dan tiap minggunya ditampilkan Dashboard Mingguan dan dipublikasikan melalui *Weekly Dashboard Website CCDP* yang memantau dan melaporkan Perkembangan Proyek

Sepanjang tahun 2014, PMO menyelenggarakan sekitar 50 kegiatan bimbingan teknis. Dan meskipun diperkirakan lebih dari 1000 orang berpartisipasi dalam lokakarya dan lokakarya besar, dan kegiatan ini diadakan di tingkat desa melalui koordinasi Musyawarah PIU Kabupaten, dengan 72 lokakarya dan bimbingan teknis. Diselenggarakan di tingkat kabupaten (rata-rata 8 orang per PIU), diperkirakan sekitar 2000 orang berpartisipasi dalam acara ini. Learning Center atau Kubraya kemudian melatih 200 peserta melalui 20 sesi berbeda, diperkirakan pada tahun 2014. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan yang disponsori PMO dan PIU harus 3.200 peserta. Selanjutnya di tingkat kabupaten melalui Dinas Perikanan Kelautan (DKP) yang membentuk unit pelaksana proyek (PIU) setempat, di masing-masing PIU, Bupati dan walikota mengeluarkan surat keputusan (SK) sebagai penjelasan struktur organisasi. Prosedur dan staf pendukung Piu berada di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.

B. Program CCDP di Kabupaten Maluku Tenggara

1. Persiapan Pelaksanaan Program CCDP di Maluku Tenggara

Setiap kabupaten atau kota dipilih sebagai lokasi rencana CCDP, kemudian dikembangkan 15 desa/kelurahan pesisir, kemudian dipilih 9 desa/kelurahan sesuai kriteria. , dan kedua, partisipasi Motivasi dan keberhasilan rencana sebelumnya, dan

ketiga, potensi produksi dan nilai tambah, kelautan dan perikanan. Keempat, pulau-pulau kecil termasuk dalam setiap lokasi wilayah/kota yang memiliki pulau-pulau. Jika 9 desa sebelumnya berhasil, 6 desa sisanya akan dipilih pada tahun kedua atau ketiga. Oleh karena itu, sasaran dari proyek ini adalah membina 180 desa/kelurahan dalam 5 tahun kegiatan. Oleh karena itu, tujuan dari rencana tersebut adalah 69 Ibid.63 CCDP pada halaman 8 mencakup total 180 desa/kelurahan yang akan dibina selama 5 tahun kegiatan. Diperkirakan sebanyak 660 kepala keluarga di setiap desa/kelurahan akan berpartisipasi dalam proyek ini, dimana sekitar 60% akan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung, seperti kegiatan perikanan dan budidaya ikan, serta kegiatan kelautan dan perikanan lainnya. akhir, rencananya Total target audiens adalah 70.000 rumah tangga atau 320.000 orang.

2. Pemilihan Lokasi dan Fasilitator Program

Sejak Kabupaten Maluku Tenggara terpilih sebagai lokasi proyek CCDP IFAD oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara sebagai Project Implementaion Unit (PIU) mulai melakukan persiapan – persiapan awal termasuk memilih Ohoi- Ohoi Atau desa – desa yang akan menjadi sasaran Proyek di Kabupaten Maluku Tenggara. Selain kriteria dari PMO dan IFAD, terdapat pertimbangan pertimbangan dari PIU Dinas Kelautan dan Perikanan terkait pemerataan bantuan ke ohoi – ohoi pesisir, dimana program program nya juga di peruntukan bagi masyarakat pesisir baik dari APBN dan APBD, seperti program bantuan perahu nelayan, mobil angkutan pedesaan, pembangunan pelabuhan (dpr.go.id, 2021).

Berdasarkan perpaduan kriteria yang terpilih Kecamatan dan tiga ohoi di Kabupaten Maluku tenggara sebagai awal Project CCDP IFAD di tahap pertama tahun 2013 yaitu Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Besar, dan pada periode kedua sasaran proyek di Ohoi bertambah tahun 2014 yaitu Kecamatan Manyeuw, Kecamatan Kei kecil, Kei 65 kecil barat, Kei Basar di Ohoi Namar, Ohoi Ohoidertwaun, Ohoidertutu, Ur Pulau, Elat,dan Lerohilim ([Helena S.A Ohoiwutun, 2021](#)).

Kemudian tahun 2015 tidak ada Pembentukan desa baru, Hanya berfokus pada peningkatan kelompok,dan Pelaksanaan Penilaian Kelompok (MTR) Meet Team Review serta pelaksanaan survey, dan di tahun 2016 hingga 2017 kembali terpilih ohoi sebagai proyek CCDP di Kecamatan Manyeuw, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Hoat Sorbay, dan kecamatan Kei Besar Utara. Pertimbangan Pemilihan Ohoi atau desa di atas adalah desa yang memiliki tingkat kemiskinan masyarakat Pesisir yang tinggi, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah ([Helena S.A Ohoiwutun, 2021](#)). Program CCDP di Maluku Tenggara pada tahun pertama dimulai dengan implementasi kegiatan yang di fokuskan pada Sembilan Ohoi sasaran ,dengan begitu, PIU sesuai dengan arahan Project Manajemen Office (PMO) Mengadakan rekrutmen Tenaga Fasilitator atau bisa disebut tenaga Pendamping desa (TPD) yang akan bekerja dan mendampingi langsung di desa atau Ohoi yang menjadi sasaran Proyek,

Pelaksanaan rekrutment TPD dilakukan mulai bulan Januari di Tahun 2013 di 3 TPD, Kemudian Tahun 2014 ditambah 6 TPD sehingga berjumlah 9 TPD,dan Di tahun 2016 berjumlah 15 TPD, dengan total 15 TPD dan proses seleksi pada pelamar berdasarkan kriteria yang sudah di atur dari PMO CCDP, 71 Wawancara dengan Helena

S.A Ohoiwutun, Tenaga Pendamping Desa CCDP IFAD, 11 juni 2021, melalui aplikasi chat Messenger dan Whatsapp, maka dipilih Tenaga Pendamping desa untuk setiap desa, yang diantaranya terdapat dari Penyuluh Perikanan dan Penyuluh untuk menjadi Fasilitator atau Tenaga Pendamping Proyek CCDP, yaitu : TPD Ohoi Letvuan, Ohoi Namar dan 7 ohoi lainnya di 3 kecamatan yang terpilih, Setelah itu TPD diberi Pelatihan bimbingan Teknis Budidaya Kelautan dan Perikanan Pada february 2014, Kemudian di Tahun 2015 Pelatihan Pengembangan Teknologi Produksi berbasis Rumput Laut, dan Ikan, Kerjasama CCDP IFAD dengan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna, dan di tahun 2016 Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Ekowisata bagi TPD ([Helena S.A Ohoiwutun, 2021](#)).

3. Sosialisasi dan Perencanaan CCDP di Masyarakat Desa

Sosialisasi diberikan untuk menjelaskan pelaksanaan program mulai dari pihak donator, tingkat Pusat yakni PMO di Kementrian Kelautan dan Perikanan, kemudian Project Implementaion Unit (PIU) di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, tujuan sosialisai ini juga sebagai tahapan awal pengenalan program pada masyarakat, serta melihat penilaian dan respon, partisipasi masyarakat terhadap proyek CCDP, sosialisasi ini dilaksanakan di tiap Ohoi di tiga Kecamatan di wilayah Program sasaran. Setelah selesai sosialisasi pengenalan Program, selanjutnya kegiatan Pertemuan desa dalam rangka perencanaan pada Ohoi – Ohoi yang menjadi sasaran program, hal tersebut bertujuan menyusun terkait perencanaan kelompok usaha, kelompok infrastruktur, termasuk hal – hal apa saja yang 73 ibid 67 menjadi usulan masyarakat desa, dengan cara tiap tiap desa menyiapkan dokumen data dan informasi dengan membuat Rancangan “Rencana Pembangunan dan Pengelolaan sumber daya wilayah Pesisir “(RPPW) dan memberikan kewenangan bagi tiap” desa yang dipilih oleh IFAD untuk membuat rencana pengelolaan dan pelaksanaan di setiap desa agar program CCDP untuk pengembangan dan pembangunan masyarakat pesisir dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dan di setiap Tahun diadakan Pelatihan yang disebut “ Peningkatan Kapasitas Pokmas” di tujukan bagi kelompok usaha, Peningkatan Kapasitas biasanya diselenggarakan di Kabupaten Oleh Pelaksana Program (PIU) dan dilakukan Studi banding ke daerah / Kabupaten yang dirasa berhasil dan dapat menjadi percontohan yaitu Learning center Kabupaten Kubu Raya 74 .

Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan bantuan awal, Cummulative Project Inception Rp.19.122.470.000 juta, serta Annual Cunulative 2014 sebesar Rp. 5.760.738.000, dan mendapatkan Reward and Punishment di Kluster 2 untuk tahun 2016 sebesar 1 Milliyar 75 selain itu bantuan dalam bentuk uang tunai masing – masing kelompok yang berbeda jumlahnya. Untuk kelompok usaha besaran bantuannya sebesar Rp. 40.000.000. Sedangkan untuk bantuan infrastruktur dan kelompok PSDA besaran dana bantuan bervariasi disesuaikan dengan usulan proposal kegiatan kelompok. Hakikat nya dari sebuah Program tersebut menghasilkan sebuah Kelompok Kelompok Usaha, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di Maluku Tenggara berikut beberapa Kelompok yang telah menjadi bagian Program IFAD 1. Kelompok Usaha penangkapan ikan 2. Kelompok Budidaya rumput Laut 3. Kelompok Pengelolaan hasil Perikanan 4. Kelompok Pemasaran Perikanan, 5. Kelompok Insfrastruktur : Rumah Produksi Letvuan, Ohoira, Weer, pulau ,Namar, Ohoidertutu, Boat Jetty di Weer, Boat Jetty di Elat, Boat for marketing transportation , Motor roda 3.4 Peralatan Rumah Produksi, Pondok Informasi, Tambatan Perahu, Bantuan

Pemerintah untuk sarana Prasarana wisata Bahari, 6. Kelompok Pengelolaan Sumber daya Alam: Wisata Pantai, Wisata Goa (Ohoi Ohoi, 2021)

4. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan

Beberapa strategi yang dilaksanakan PIU kabupaten Maluku Tenggara dan diimplementasikan oleh VWG dan pendampingan TPD bagi kelompok Masyarakat Pesisir, yaitu Pembentukan Kelompok sesuai jenis usaha yakni usaha budidaya rumput laut, usaha Penangkapan Ikan, Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan, selain itu dilakukan Diversifikasi teknik budidaya rumput laut yakni menggunakan teknik long line dengan rakit apung yang berkantong, dan Pembuatan Kebun bibit rumput laut untuk memperoleh bibit unggul yakni bibit hasil kultur jaringan dan guna mengantisipasi kelangkaan bibit rumput laut pada bulan November hingga bulan Maret dimana sering muncul penyakit ice - ice, Pengaturan waktu tanam dan Panenpun harus disesuaikan dengan kalender musim usaha budidaya rumput laut, dalam Penanganan pasca Panen telah disediakan tempat penjemuran rumput laut di tepi pantai, pembangunan jalan Produksi bagi kelompok usaha agar mempermudah akses masyarakat, dan penyediaan pengadaan alat tangkap dengan sesuai penangkapan ikan kerapu, dan kakap merah menggunakan alat tangkap pancing tangan (hand line) , bubu, rawai, sedangkan untuk ikan Pelagis campuran menggunakan alat tangkap jaring, dan rumpon.

Hasil dari Pemberdayaan CCDP menghasilkan Komoditas Unggulan yaitu yang Rumput Laut. Hal ini didukung dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang mendorong dan menjadikan Maluku Tenggara sebagai lumbung penghasil rumput laut terbaik di Wilayah Timur Indonesia, kemudian Ikan Kerapu dan Kakap Merah, Ikan Pelagis dan Campuran, dan Produk Unggulan Hasil Turunan dari Komoditas Unggulan berupa stik rumput laut, sirup rumput laut, Kerupuk rumput laut, Ikan kerapu segar, Ikan Fillet, Abon Ikan, serta Ikan Asin. (Helena S.A Ohoiwutun, 2021).

IFAD memberikan bantuan dana Modal dalam Proyek CCDP, dengan di tambah bantuan APBN dan APBD Maluku Tenggara, Penguatan Kelembagaan dalam Proyek CCDP dibentuknya PMO sebagai Aktor Penyaluran dana, dan mengevaluasi serta pengawasan dalam kegiatan tingkat PIU hingga VWG, dan di lakukan oleh PIU bekerjasama dengan para swalayan serta promosi melalui media sosial sebagai pendistribusian hasil Produk baik di daerah maupun di luar daerah, di bentuk kelompok sumber daya Alam sebagai upaya pemeliharaan Lingkungan di Ohoi Ohoi, menciptakan desa yang memiliki potensi wisata Bahari, dengan Bimbingan Teknis pembuatan dan pengolahan hasil perikanan, dan Village Work Group membentuk beberapa kelompok dengan di bantu 1 badan pendamping dan penyuluh yang telah dipilih oleh PIU dari Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara, untuk membuat dan pengembangan Usaha mengenai potensi sumber daya di daerah masing – masing.

Hasil proyek CCDP berdampak positif bagi masyarakat pesisir Maluku Tenggara, dan hal yang paling dirasakan adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan taraf hidup penerima program, penciptaan lapangan kerja baru, dan membuka akses pemasaran yang lebih besar, khususnya bagi keluarga nelayan, dimana perempuan nelayan diberdayakan dan dilibatkan dalam pelaksanaan pengolahan sumber daya kelautan, keluarga nelayan dapat menabung dari hasil kelompok usaha, dan

masyarakat pesisir berpengalaman dalam mengolah dan membudidayakan perikanan dan budidaya rumput laut.

Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan IFAD dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Coastal Community Development Project (CCDP) Ini merupakan Kerjasama Bilateral dan masuk dalam klasifikasi Kerjasama Teknis dan Kerjasama Fungsional. Setiap lingkup Kerjasama Teknis ditunjukkan pada berbagai Pelatihan dan bimbingan Teknis baik untuk Tenaga Pendamping Desa, maupun kelompok masyarakat yang dilakukan IFAD melalui PMO dengan dikoordinasikan bersama PIU sebagai Pelaksana di Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan Kerjasama Fungsional merupakan hibah dana yang diberikan oleh IFAD, dan juga Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah daerah melalui APBN, dan APBD.

Kerjasama ini saling menguntungkan kedua belah pihak, dan masyarakat pesisir Maluku Tenggara merasakan dampak positif, membuat masyarakat pesisir mandiri dan sukses dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan dari proyek IFAD CCDP dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari beberapa kunjungan dan minat dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain keberhasilan proyek CCDP, kunjungan Vice President IFAD ini, liputan National Geographic Traveler International Magazine, kunjungan tim learning route dari Pakistan, dan kunjungan Ratu Maxima, Anda bisa lihat. Menteri Belanda dan India telah meninjau dan menyelidiki kegiatan dan hasil implementasi CCDP, dan IFAD secara independen mendanai apakah hanya CCDP yang menerima skor memuaskan dari IFAD di antara ratusan proyek yang didanai di seluruh dunia. Saya mengakui bahwa saya memiliki kepuasan. Skor keberhasilan diraih oleh IFAD.

Kesimpulan

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemberdayaan pesisir dicapai melalui program CCDP oleh IFAD. Program ini dirancang oleh IFAD untuk membantu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meningkatkan perekonomian dan memberdayakan wilayah pesisir. Program ini dilaksanakan dari tahun 2012 hingga 2017. Berdasarkan pembahasan di atas, program CCDP merupakan hasil kerjasama bilateral, karena program ini merupakan hasil dari Framework National Opportunity Strategy Program (COSOP) yang telah disetujui kesepakatannya. Menurut IFAD dan Indonesia yang tergabung dalam IFAD. Program CCDP mencakup tiga komponen: pemberdayaan masyarakat, pengembangan pengelolaan sumber daya pesisir, pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan, dan manajemen proyek, termasuk rencana untuk mencapai pemberdayaan masyarakat, pendampingan, dan kemandirian masyarakat pesisir melalui pembentukan kelompok.

Namun terdapat beberapa kendala dalam penelitian ini yaitu yang memperhatikan masalah geografis, dan sangat sulitnya menghubungi kelompok bantuan yang didistribusikan di pulau-pulau tersebut. Hasil dari upaya bersama, khususnya hasil rumput laut, ikan laut dan ikan mengalami permainan harga tengkulak. Pada akhir rencana 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susie Puiyastuti menghentikan semua bantuan asing. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempengaruhi pelaksanaan CCDP IFAD di semua wilayah/kota termasuk Maluku di tenggara Beberapa desa/Ohoi terpilih pada tahun 2016 dan tidak menerima TPD dan PIU sebagai rencana Bantuan terbesar dari pelaksana .

Daftar Pustaka

- Boediono. Pengantar ilmu Ekonomi No 3 : Ekonomi Internasional, BPFE, Yogyakarta, 1981.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Gema Pesisir. News Letter edisi 2016 diakses, file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/GeMa%20Pesisir%20SENARAI%20FASILITASI%20KEGIATAN%20PMO%20DI%20membangun%20dari%20pinggiran.%20Edisi%20DESEMBER%20pesisir%20sehat%20ikan%20berlimpah%20masyarakat%20sejahtera-2.pdf
- I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Mardi Yatno Hutomo. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Jakarta : Bappenas.
- Musa Al Jundi. 2014. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia*. skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, di akses dari <http://scholar.unand.ac.id/8889/3/bab%201.pdf>
- Robert Jackson & Georg Sorensen, 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Laporan Kunjungan Komisi V DPR RI, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-LaporanKunjungan-Kerja-Ke-PRov.-Malut-1464336407.pdf>,
- IFAD. *Profil IFAD* diakses www.ifad.org/web/guest/finance
- Jurnal Implementasi ketentuan pasal 50 Unclos di wilayah negara Kepulauan, Rechts Vinding Media pembinaan Hukum Nasional, volume 8, Nomor 2, Agustus 2019 halaman 293 diakses dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/314/215>
- Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, VoL. 12 No.02.2016 halaman 1858, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/125853-ID-fenomena-kemiskinan-nelayan-perspektif-t.pdf>
- Kemendes Maluku Tenggara. *Profil Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara*, diakses, https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/8102_Maluku_Kab_Maluku_Tenggara_2014.pdf
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07/HUK/KEP/II/1984, *Pola Dasar Pengembangan Bidang Kesejahteraan Sosial*, diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?entitas=516>
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07/HUK/KEP/II/1984, *Pola Dasar Pengembangan Bidang Kesejahteraan Sosial*, halaman 97, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?entitas=516> The State of World

Fisheries and Aquaculture 2020, diakses
<http://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf>

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dokumen perencanaan Ohoi Ohoidertawun, diakses <https://malukutenggarakab.go.id/web/component/content/article/100-galeri-foto-kegiatan/208-bupati-malra-hadiri-pengecoran-gedung-gereja-elim-jemaat-gpm-ohoidertawun.html?Itemid=587>

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Letak dan Kondisi Geografi Maluku Tenggara, diakses <https://www.malukutenggarakab.go.id/web/profil/letak-dan-kondisi-geografis.html>

Sesuai Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan daerah Tertinggal tahun 2015-2019, diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41885/perpres-no-131-tahun-2015>

Sesuai Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan daerah Tertinggal tahun 2015-2019, diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41885/perpres-no-131>

IFAD. Profil IFAD diakses www.ifad.org/web/guest/finance